

SKRIPSI

FITRI INDAH MELANI

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
BERDASARKAN
KESEPAKATAN KERJA WAKTU TERTENTU
DI PT. TRI STAR BAKERY
SIDOARJO**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2001**

Panitia Penguji Skripsi :

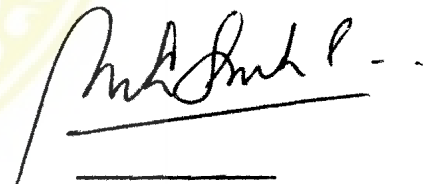
Ketua : R. Indiarso, S.H.



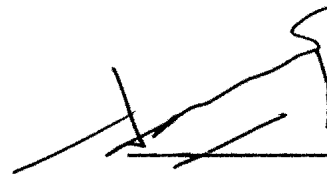
Anggota : 1. Machsoen Ali, S.H., M.S.



2. Dr. M. L. Souhoka, S.H., M.S.



3. Lanny Ramli, S.H., M.Hum.



**PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
BERDASARKAN
KESEPAKATAN KERJA WAKTU TERTENTU,
DI PT. TRI STAR BAKERY SIDOARJO**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI DAN MEMENUHI PERSYARATAN
GUNA MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



Machsoen Ali, S.H., M.S.
NIP. 130 355 366

Penyusun,



Fitri Indah Melani
NIM. 039714470

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, berikut ini adalah kesimpulan pembahasan atas rumusan permasalahan, yaitu :

- 1) Dalam praktek penyelenggaraan hubungan kerja berdasarkan Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu (KKWT), ternyata banyak terdapat penyimpangan terhadap ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI no.PER-02/MEN/1993 tentang Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu. KKWT seringkali dibuat dalam bentuk perjanjian baku, yang substansinya tidak memenuhi persyaratan untuk dibuatnya suatu KKWT, baik berdasarkan ketentuan Pasal 1320 BW maupun Permenaker no.PER-02/MEN/1993.
- 2) Upaya penyelesaian perselisihan perburuhan antara Pengusaha dengan Tenaga Kerja Kontrak terkait dengan masalah PHK, dapat dilakukan oleh Pegawai Perantara maupun Panitia Daerah. Jika terjadi perselisihan, para pihak tetap dapat meminta anjuran Pegawai Perantara untuk dicapai suatu penyelesaian. Apabila salah satu pihak atau keduanya kurang puas atas anjuran tersebut, maka Pegawai Perantara ini pun dapat meminta penetapan atas anjuran yang ia keluarkan, kepada Panitia Daerah.



2. Saran

Dari uraian yang telah dikemukakan mulai Bab Pendahuluan sampai dengan Bab Kesimpulan, berikut ini beberapa saran yang dapat disampaikan :

- 1) Dalam suatu hubungan kerja di perusahaan, hendaknya Pengusaha tidak lagi memandang rendah Pekerja, baik dari segi kedudukan maupun pengaruhnya. Pengusaha hendaknya tidak menganggap Pekerja sebagai faktor yang membebani biaya produksi, melainkan justru menempatkan Pekerja sebagai mitra yang sejajar, untuk bersama-sama berupaya meningkatkan hasil produksi di perusahaan yang bersangkutan, sehingga pada akhirnya mampu menciptakan kesejahteraan bagi kehidupan bangsa dan negara.
- 2) Kegiatan pengawasan ketenagakerjaan, sudah saatnya untuk ditingkatkan. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah, hendaknya berupaya untuk meningkatkan kinerjanya. Terutama, dalam hal melakukan penegakan hukum preventif, untuk mencegah terjadinya perselisihan perburuhan, khususnya menyangkut pembentukan dan pelaksanaan KKWT di perusahaan. Mengingat perselisihan perburuhan dapat mengakibatkan terhambatnya proses produksi di perusahaan, yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, juga hendaknya lebih ditingkatkan, demi tegaknya negara hukum Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.